

Bahasa, Stigma, dan Perubahan Sosial: Merekonstruksi Identitas Lokal melalui Program Pelestarian Bahasa Wemale

Language, Stigma, and Social Change: Reconstructing Local Identity through Wemale Language Preservation Programs

 <https://doi.org/10.30598/populis.17.2.199-213>

Gilbert Risky Lyon^{1*}, Yustina Sopacua², Selvianus Salakay³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*gilbertriskyiyon@gmail.com

Abstract

This article analyzes the roles of families, schools, and village governments in preserving the Wemale language in West Seram Regency, Maluku, with a focus on the unequal contributions among actors and the social stigma attached to the use of local languages. It also examines how community-based programs such as the Community Learning Center (PKBM) serve as spaces for reconstructing local identity through the use of Wemale in informal and nonformal educational settings. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis in villages with active Wemale-speaking communities. Thematic analysis was used to identify patterns in language use, social perceptions, and preservation strategies by local actors. The findings reveal that families' role in language transmission has weakened due to modernization, digital influences, and stigma associating the Wemale language with backwardness. In contrast, schools and PKBM demonstrate more active engagement, particularly through alternative learning spaces such as Walang Belajar, which utilize contextual approaches to connect youth with the local language. However, actor coordination remains weak and affirmative policies supporting Wemale as a source of collective identity are absent. This study offers a novel intersection of language, social stigma, and identity politics in Eastern Indonesia while highlighting PKBM's strategic role in minority language preservation.

Keywords: Language Preservation, Local Identity, Nonformal Education, Social Stigma, Wemale Language

Info Artikel

Naskah diterima: 22/02/2023

Revisi terakhir: 13/04/2023

Disetujui: 04/05/2023

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Bahasa bukan semata alat komunikasi, melainkan juga cerminan identitas, memori kolektif, dan kekayaan pengetahuan suatu komunitas. Di Maluku, salah satu wilayah dengan keragaman linguistik yang tinggi, bahasa-bahasa lokal seperti Wemale tengah menghadapi situasi genting. Maggalatung et al. (2021) dan Tahir et al. (2020) menunjukkan bahwa dari lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia, puluhan telah punah dan ratusan lainnya berada dalam kondisi terancam. Bahasa Wemale termasuk dalam kategori rentan, dengan jumlah penutur aktif yang terus menurun dan dominasi bahasa Indonesia yang semakin menguat dalam ruang-ruang publik dan domestik (Lim et al., 2021). Lebih dari sekadar statistik, gejala ini mencerminkan perubahan kultural yang dalam, di mana bahasa ibu perlahan kehilangan daya hidupnya, bahkan dalam lingkup keluarga sendiri.

Situasi ini diperparah oleh adanya stigma sosial yang melekat pada penggunaan bahasa lokal. Bahasa Wemale, sebagaimana banyak bahasa minoritas lainnya, kerap diasosiasikan dengan keterbelakangan, sehingga orang tua enggan mewariskannya kepada anak-anak mereka. Alih-alih menjadi simbol kebanggaan, bahasa lokal justru menjadi beban identitas yang ingin dilepaskan. Padahal, seperti yang ditekankan oleh Arju & Zeffry (2023), bahasa merupakan titik masuk penting dalam mempertahankan kontinuitas budaya dan memperkuat ketahanan komunitas lokal terhadap tekanan globalisasi. Oleh karena itu, pelestarian bahasa tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai strategi pelestarian bahasa daerah. Nurutdinova et al. (2020) dan Siregar (2022) mengemukakan pentingnya revitalisasi bahasa melalui pendidikan dan media lokal. Meighan (2021) mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam dokumentasi dan pembelajaran bahasa ibu. Penelitian oleh Taher et al. (2022) serta Taher (2022) mengenai bahasa Rejang dan Enggano di Bengkulu, dan Hadzantonis (2019) tentang revitalisasi bahasa Osing di Banyuwangi, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat efektif jika didukung oleh infrastruktur sosial yang memadai. Penelitian Musi et al. (2022) pada komunitas Bugis-Makassar juga menekankan pentingnya pendidikan nonformal dalam mentransmisikan bahasa ke generasi muda.

Selanjutnya, berbagai studi menunjukkan peran pendidikan formal sebagai agen pelestarian bahasa. Said & Zhu (2019) dan Woolard (2020) meneliti kurikulum muatan lokal di sekolah dasar dan bagaimana guru memfasilitasi pembelajaran bahasa ibu. Di sisi lain, penelitian oleh Wang (2019) dan Yamin et al. (2020) menyoroti kendala birokratis dalam implementasi kebijakan bahasa daerah di sekolah negeri. Konteks digitalisasi juga tidak bisa diabaikan, seperti ditunjukkan dalam studi oleh Beaudrie et al. (2021), Grove (2021), dan Spolsky (2019) yang mengungkapkan bagaimana media sosial menjadi arena baru pertarungan simbolik bahasa-bahasa lokal dengan bahasa global.

Muncul pula pendekatan pelestarian bahasa melalui ruang nonformal. Studi oleh Abbas (2021) mengenai Sanggar Belajar Bahasa Makassar, serta riset dari Imsiyah et al. (2023) tentang kelas bahasa daerah di komunitas urban Bondowoso, memperlihatkan bahwa pendidikan berbasis komunitas memberi keleluasaan dalam metode pembelajaran yang lebih kontekstual. Penelitian oleh Brata et al. (2022), Mu'jizah et al. (2022) dan Zulkarnain et al. (2021) bahkan mengindikasikan bahwa lembaga seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) memainkan peran penting dalam mengembalikan kepercayaan diri komunitas terhadap bahasa ibunya. Namun, sebagian besar penelitian ini masih terfokus pada wilayah-wilayah dengan dukungan institusional yang relatif kuat, dan belum banyak menyentuh konteks kepulauan yang marginal seperti Seram Bagian Barat.

Dari berbagai literatur tersebut, tampak bahwa pendekatan pelestarian bahasa cenderung masih terfokus pada institusi pendidikan formal dan wilayah urban atau semiurban. Peran ruang-ruang belajar nonformal seperti PKBM di daerah terluar, tertinggal, dan terpinggirkan, terutama dalam membangun kembali identitas lokal yang terserak akibat

modernisasi dan stigma sosial, belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Demikian pula, dinamika relasi kuasa antaraktor lokal—keluarga, sekolah, dan pemerintah desa—masih menjadi celah pemahaman dalam strategi pelestarian bahasa yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, menjelajahi tidak hanya struktur kelembagaan tetapi juga ruang-ruang simbolik dan afektif di mana bahasa Wemale hidup, dilupakan, dan diperjuangkan. Alih-alih hanya berfokus pada aspek linguistik semata, penelitian ini mengaitkan bahasa dengan stigma sosial, dinamika antaraktor lokal, dan proses rekonstruksi identitas kolektif. Dengan menempatkan PKBM sebagai arena kultural yang hidup, penelitian ini ingin menyoroti bentuk-bentuk “agensi lokal” yang sering kali terabaikan dalam wacana pelestarian bahasa.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran keluarga, sekolah, dan pemerintah desa dalam pelestarian bahasa Wemale di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, serta memahami bagaimana program-program lokal seperti PKBM dapat dimaknai sebagai medium rekonstruksi identitas lokal melalui praktik penggunaan bahasa dalam ruang-ruang pendidikan nonformal dan informal. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu sosial dan humaniora, tetapi juga inspirasi kebijakan bagi upaya pelestarian bahasa daerah di wilayah kepulauan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena sifat permasalahan yang diangkat memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna sosial, nilai-nilai budaya, dan relasi kuasa yang melatarbelakangi dinamika pelestarian bahasa Wemale. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses-proses sosial yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik, serta untuk menangkap nuansa naratif, simbolik, dan afektif yang melekat dalam praktik bahasa sehari-hari. Sebagaimana dinyatakan oleh Sarfo et al. (2021), pendekatan kualitatif sangat relevan ketika fokus penelitian adalah pada eksplorasi makna yang dikonstruksi oleh pelaku sosial dalam konteks kultural tertentu.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di beberapa desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, yakni desa-desa yang masih memiliki komunitas penutur Wemale, baik secara aktif maupun pasif. Wilayah ini menjadi signifikan karena merupakan salah satu kantong terakhir keberadaan bahasa Wemale yang relatif masih digunakan dalam ranah domestik maupun kegiatan adat. Di tengah tekanan globalisasi dan marjinalisasi geografis, komunitas-komunitas ini menyimpan dinamika sosial yang kompleks dan unik, sehingga penting untuk ditelusuri lebih dekat. Selain itu, wilayah ini juga menjadi menarik secara akademik karena minimnya kajian sosiolinguistik yang menyoroti hubungan antara bahasa lokal dan rekonstruksi identitas dalam konteks pendidikan nonformal di kawasan kepulauan timur Indonesia.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan posisi sosial mereka dalam upaya pelestarian bahasa. Sebanyak 21 orang menjadi informan utama, terdiri dari kepala desa, guru sekolah dasar, fasilitator PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), orang tua murid, tokoh adat, serta tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan budaya. Para informan ini dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan kontekstual mengenai praktik penggunaan bahasa Wemale, baik dalam konteks formal maupun informal. Pemilihan mereka tidak hanya mempertimbangkan peran struktural, tetapi juga kebermaknaan pengalaman mereka dalam praktik pewarisan dan pemaknaan bahasa lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang dialog yang fleksibel antara peneliti dan informan, sehingga memungkinkan eksplorasi narasi yang lebih personal dan reflektif (Klevens, 2023). Observasi partisipatif dilakukan dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan PKBM, serta dalam interaksi keseharian di lingkungan desa, guna menangkap bagaimana bahasa Wemale digunakan, diposisikan, dan dimaknai dalam praktik sosial. Dokumentasi dilakukan terhadap materi ajar, catatan kegiatan, artefak budaya, dan media komunikasi yang digunakan komunitas dalam mendukung penggunaan bahasa lokal.

Untuk memastikan validitas data, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan ketiga metode pengumpulan data tersebut (triangulasi metode), serta dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis informan (triangulasi sumber). Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi waktu, dengan melakukan pengumpulan data dalam beberapa kunjungan berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diberikan oleh informan. Pendekatan ini sejalan dengan panduan yang dikemukakan oleh Denzin & Lincoln (2018), yang menekankan bahwa triangulasi dalam penelitian kualitatif bukan hanya soal verifikasi data, tetapi juga tentang memperluas pemahaman terhadap kompleksitas fenomena sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Peran dalam Pewarisan Bahasa: Antara Keluarga, Sekolah, dan Pemerintah Desa

Dalam konteks pewarisan bahasa Wemale di Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan adanya ketimpangan kontribusi yang signifikan antara tiga aktor utama: keluarga, institusi pendidikan formal, dan pemerintah desa. Masing-masing memegang potensi strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa lokal, namun dalam praktiknya, keterlibatan mereka tidak setara dan tidak terkoordinasi.

Keluarga, yang secara historis menjadi ruang primer bagi transmisi bahasa ibu, kini menghadapi kemunduran peran yang mencolok. Di beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian, seperti di Dusun W, hanya sedikit keluarga yang masih secara aktif menggunakan bahasa Wemale dalam komunikasi sehari-hari dengan anak-anak. Banyak orang tua mengaku

lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia karena dianggap lebih “maju” dan memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Salah satu informan, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun (Ibu Y), mengungkapkan bahwa ia tidak ingin anaknya mengalami kesulitan di sekolah karena terbiasa dengan bahasa yang “tidak dipakai orang luar.” Dalam pandangan ini, bahasa Wemale dianggap hanya memiliki nilai domestik, bukan sosial-ekonomi. Fenomena ini menguatkan pandangan Blommaert dan Rampton (2020) bahwa peran bahasa minoritas sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang diberikan oleh komunitas kepada bahasa tersebut, dan keluarga, sebagai agen pertama, rentan terhadap tekanan dari nilai-nilai modern yang menempatkan bahasa ibu sebagai beban identitas, bukan aset.

Hasil observasi di beberapa rumah penduduk memperkuat hal ini. Dalam beberapa interaksi sore hari di halaman rumah, anak-anak lebih banyak berbicara dalam bahasa Indonesia kepada orang tua maupun antar teman sebaya, meskipun orang tuanya masih fasih berbahasa Wemale. Bahkan dalam situasi informal seperti saat makan bersama atau acara keluarga kecil, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa dominan. Ini menunjukkan bahwa bahasa Wemale mulai kehilangan fungsi simboliknya sebagai bahasa afeksi dan keakraban di ranah keluarga.

Berbeda dengan keluarga, sekolah justru menunjukkan semangat pelestarian yang lebih tinggi, meskipun terbatas. Di SD N 2 Hatu, misalnya, guru-guru mencoba menyisipkan penggunaan bahasa Wemale dalam pembelajaran, terutama dalam pelajaran muatan lokal dan saat menyanyikan lagu-lagu tradisional. Seorang guru kelas (Bapak R), menyampaikan bahwa meski tidak ada modul resmi dalam bahasa Wemale, ia merasa penting untuk memperkenalkan beberapa kosakata dan frasa dasar agar murid-murid tetap mengenali akar budayanya. Upaya ini menunjukkan adanya bentuk agensi institusional, di mana sekolah berperan sebagai pelindung identitas lokal meski berada di bawah tekanan kurikulum nasional yang homogen. Revis (2019) dan Shah (2023) menjelaskan bahwa agensi sociolinguistik muncul ketika aktor-aktor sosial—dalam hal ini guru—memanfaatkan ruang terbatas dalam sistem dominan untuk mempertahankan praktik budaya yang marjinal.

Namun, keterbatasan dukungan struktural dari pemerintah desa menjadi titik lemah yang cukup nyata. Tidak ditemukan satupun kebijakan afirmatif di tingkat desa yang secara eksplisit menyebut pentingnya pelestarian bahasa Wemale. Bahkan dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, aspek kebahasaan dan kebudayaan nyaris absen. Seorang kepala dusun (Bapak M) mengakui bahwa meski mereka menyadari pentingnya pelestarian bahasa, belum ada anggaran maupun inisiatif konkret yang diarahkan untuk itu. Pemerintah desa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan bantuan ekonomi, sementara isu bahasa dianggap terlalu “lunak” dan tidak mendesak. Dalam perspektif sociolinguistic agency, ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa di tingkat lokal, di mana bahasa lokal tidak memiliki posisi tawar dalam kerangka pembangunan desa. Ketidakhadiran kebijakan ini bukan hanya berdampak pada praktik sehari-hari, tapi juga memberi sinyal kepada masyarakat bahwa bahasa Wemale tidak termasuk dalam ranah “yang

penting untuk masa depan.”

Kondisi ini, bila dilihat secara holistik, mencerminkan relasi yang timpang dalam ekologi pelestarian bahasa. Ketika keluarga tercerabut dari nilai budaya lokal, sekolah berjuang sendiri tanpa sokongan kurikulum, dan pemerintah desa tidak memberikan legitimasi struktural, maka bahasa Wemale kehilangan tiga tiang penyangganya secara bersamaan. Ketimpangan ini bukan hanya soal absennya kebijakan, tetapi juga menyangkut persepsi kolektif tentang nilai simbolik bahasa itu sendiri. Seperti dijelaskan Chun (2019) bahwa bahasa hanya dapat bertahan bila ia dilegitimasi dalam jaringan sosial dan simbolik yang kuat—dan dalam konteks ini, jaringan tersebut tampak rapuh dan terfragmentasi.

Pewarisan bahasa Wemale tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial yang lebih luas: bagaimana komunitas lokal menilai dirinya sendiri, dan bagaimana aktor-aktor lokal membangun sinergi atau justru saling melemahkan dalam menjaga warisan budayanya. Ketimpangan peran ini menjadi titik mula untuk memahami mengapa pelestarian bahasa lokal seringkali gagal meskipun aktor-aktornya hadir—karena kehadiran tersebut tidak berjalan dalam satu irama dan visi yang sama.

Bahasa dan Stigma Sosial: Representasi, Penolakan, dan Resistensi Kultural

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas, kebanggaan, dan posisi sosial. Dalam konteks masyarakat Wemale di Kabupaten Seram Bagian Barat, fungsi simbolik ini telah mengalami perubahan drastis seiring masuknya nilai-nilai modernitas dan pengaruh budaya luar. Bahasa Wemale yang dahulu menjadi identitas utama komunitas kini sering kali diasosiasikan dengan keterbelakangan, kekunoan, bahkan ketidaksesuaian dengan gaya hidup modern. Stigma ini tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk oleh logika dominasi budaya nasional dan arus globalisasi yang mengutamakan bahasa-bahasa pusat sebagai tanda kemajuan.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa stigma terhadap bahasa Wemale banyak berkembang di kalangan generasi muda dan kelompok menengah terdidik. Di Desa Uraur, misalnya, seorang ibu rumah tangga (Ibu M.W.) menyampaikan bahwa dalam lingkungan keluarga, anak-anak tidak lagi memahami bahasa daerah karena mereka tumbuh dalam era yang sangat dipengaruhi teknologi. Ia menggambarkan kesulitan orang tua dalam membiasakan penggunaan bahasa Wemale, terutama karena anak-anak lebih akrab dengan bahasa Indonesia melalui interaksi digital dan lingkungan pertemanan mereka. Menurutnya, anak-anak kini lebih mengikuti gaya bahasa yang dianggap modern, dan merasa bahasa daerah hanya akan membuat mereka terlihat berbeda atau bahkan “ketinggalan zaman.”

Stigma ini juga diperkuat oleh kecenderungan masyarakat untuk menilai identitas modern berdasarkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik. Seorang informan lain (Bapak C.H.), juga dari Desa Uraur, menuturkan bahwa sebagai orang tua, ia tidak bisa memaksa anak-anaknya untuk menggunakan bahasa daerah karena mereka telah terbiasa dengan bahasa Indonesia dan merasa nyaman dengannya. Ia mencatat bahwa pengaruh pendatang dan wisatawan dari luar desa mempercepat perubahan sikap terhadap bahasa, di

mana penggunaan bahasa Indonesia dianggap lebih universal dan lebih prestisius dibandingkan bahasa Wemale.

Kondisi ini terkonfirmasi melalui observasi lapangan yang dilakukan peneliti di beberapa ruang sosial, seperti rumah-rumah warga, sekolah, dan warung kopi lokal. Di sore hari, anak-anak yang berkumpul di pelataran rumah lebih banyak bercakap dalam bahasa Indonesia, bahkan kepada orang tua mereka. Dalam salah satu kegiatan belajar di PKBM, hanya sedikit murid yang mampu menjawab salam atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Wemale. Ketika peneliti mencoba menyapa dengan kosakata Wemale, sebagian remaja tertawa atau menganggap itu sebagai candaan. Hal ini mencerminkan bahwa bahasa Wemale telah kehilangan keakraban emosionalnya di benak generasi muda, dan bahkan mulai digeser ke ranah humor atau sesuatu yang tidak serius.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Kinder et al. (2022) di mana bahasa-bahasa minoritas sering kali mengalami devaluasi simbolik dalam sistem sosial yang mendewakan bahasa dominan sebagai standar tunggal kemajuan dan pendidikan. Dalam kerangka ini, anak-anak dan remaja Wemale secara tidak sadar mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma linguistik mayoritas, yang membuat mereka menjauhi bahasa ibu demi mendapatkan penerimaan sosial. Proses ini bukan semata bentuk pilihan individual, tetapi bagian dari kekerasan simbolik yang menyusup dalam cara masyarakat memaknai bahasa dan nilai-nilai kemajuan.

Namun demikian, resistensi terhadap stigma ini juga mulai terlihat, khususnya dalam ruang-ruang alternatif seperti PKBM dan komunitas adat. Di Walang Belajar yang dikelola oleh PKBM di Desa Hatawano, misalnya, fasilitator belajar sengaja menyisipkan materi dan aktivitas yang melibatkan bahasa Wemale. Anak-anak diajak menyanyi lagu daerah, memainkan permainan tradisional yang menggunakan instruksi dalam bahasa ibu, dan menceritakan kisah lokal dalam bahasa Wemale yang sederhana. Dalam suasana yang tidak menilai, bahasa Wemale justru mendapatkan tempat kembali sebagai sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan. Salah satu fasilitator (Ibu L.R.) menyatakan bahwa setelah beberapa minggu, anak-anak mulai menggunakan beberapa frasa dalam bahasa Wemale secara spontan, terutama saat bermain atau menyapa guru.

Ruang-ruang seperti PKBM membuktikan bahwa stigma terhadap bahasa lokal bukanlah sesuatu yang permanen. Ketika dikelola dengan pendekatan yang inklusif, humanis, dan kontekstual, resistensi terhadap dominasi simbolik dapat dibangun perlahan. Bahasa Wemale kembali menjadi bahasa yang “hidup”—tidak hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai bagian dari identitas kultural yang relevan bagi generasi kini.

Meskipun bahasa Wemale saat ini berada dalam posisi yang tertekan oleh stigma dan narasi modernitas, masih terdapat celah harapan melalui upaya-upaya berbasis komunitas yang mereposisikan bahasa sebagai sumber kebanggaan dan kebersamaan. Perlawanan terhadap devaluasi simbolik ini memperlihatkan bahwa bahasa ibu tidak mati karena waktu, tetapi bisa dilestarikan jika ia diberi ruang untuk tumbuh dalam makna yang baru—makna yang relevan, inklusif, dan dimiliki bersama oleh komunitasnya.

PKBM dan Walang Belajar sebagai Arena Rekonstruksi Identitas Lokal

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan kegiatan walang belajar di Desa Uraur menjadi ruang alternatif yang penting dalam upaya merekonstruksi identitas lokal melalui pelestarian bahasa Wemale. Sebagai institusi pendidikan nonformal yang fleksibel dan kontekstual, PKBM tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar dalam arti pedagogis, tetapi juga sebagai arena ekspresi budaya, di mana bahasa daerah kembali dihadirkan sebagai bagian penting dari kehidupan komunitas. Dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat, PKBM di Desa Uraur menunjukkan bahwa pendidikan bisa disesuaikan dengan realitas lokal, termasuk kekhawatiran terhadap punahnya bahasa ibu.

Dalam pengamatan langsung, kegiatan walang belajar yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul lima sore di rumah Bapak E.S., memperlihatkan suasana yang sederhana namun sarat makna. Ruang tamu rumah dialihfungsikan menjadi kelas mini yang diisi dengan bangku kayu panjang, papan tulis sederhana, dan poster-poster kosakata bahasa Wemale yang ditempel di dinding. Anak-anak dan beberapa orang tua tampak duduk berdampingan, mengikuti sesi pengenalan kosakata, menyanyikan lagu daerah, serta mendengarkan cerita rakyat yang disampaikan dalam bahasa Wemale. Meskipun tampak akrab dan menghangatkan suasana, partisipasi dari kalangan remaja masih tergolong rendah, sebuah tantangan serius yang diakui oleh para pengelola dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh E.S., yang juga merupakan pengajar utama dalam program ini, kegiatan walang belajar dirancang untuk menjembatani kesenjangan antargenerasi dalam hal penggunaan bahasa daerah. Ia menjelaskan bahwa minat remaja untuk terlibat masih sangat minim karena adanya persepsi bahwa bahasa daerah tidak “gaul” dan tidak relevan dengan tuntutan zaman. Sementara itu, menurut J.L., Kepala Desa Uraur, tantangan utama terletak pada cara memodifikasi metode pembelajaran agar lebih menarik bagi generasi muda yang telah akrab dengan teknologi dan budaya digital. Ia menyebutkan bahwa walaupun pihak desa telah memfasilitasi program ini dengan dukungan penuh, hasilnya masih jauh dari harapan karena “anak-anak lebih tertarik belajar bahasa Inggris ketimbang bahasa mereka sendiri.”

Realitas ini memperlihatkan bagaimana ruang belajar seperti PKBM harus menghadapi tekanan globalisasi dan ideologi bahasa dominan yang mengikis nilai simbolik bahasa minoritas. Román et al. (2022) menekankan pentingnya ruang belajar berbasis komunitas sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan bahasa-bahasa yang terancam punah. Dalam konteks ini, PKBM berfungsi tidak sekadar sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai medan simbolik di mana bahasa Wemale diposisikan kembali sebagai bagian dari identitas kolektif yang layak dihargai.

Lebih dari itu, pembelajaran yang berlangsung dalam PKBM juga bersifat performatif. Misalnya, dalam sesi bercerita, para peserta tidak hanya diajak mendengarkan, tetapi juga mementaskan kembali cerita dengan gaya tutur lokal, lengkap dengan intonasi dan gestur khas. Aktivitas ini menciptakan ruang di mana bahasa tidak sekadar diajarkan, tetapi ditampilkan sebagai identitas yang hidup. Pendekatan ini sesuai dengan gagasan bahwa

ruang-ruang belajar komunitas mampu membangkitkan language pride dan merekonstruksi makna identitas lokal secara kolektif.

Namun demikian, keberhasilan program ini sangat tergantung pada keberlanjutan dan adaptabilitas metode pengajaran. Sebagaimana dicatat oleh beberapa tokoh masyarakat, diperlukan inovasi yang menggabungkan media digital, seni, dan narasi personal agar program lebih inklusif terhadap minat generasi muda. Ruang belajar seperti PKBM dan walang belajar harus mampu menjawab tantangan zaman, sambil tetap menjaga akar kultural yang menjadi jantung identitas masyarakat Uraur. PKBM dan walang belajar bukan hanya menjadi simbol resistensi terhadap peminggiran bahasa daerah, tetapi juga merupakan upaya aktif merekonstruksi identitas lokal dalam lanskap sosial yang terus berubah. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa pelestarian bahasa tidak hanya soal pelajaran, tetapi juga tentang kebanggaan, komunitas, dan masa depan yang disulam dari ingatan kolektif.

Fragmentasi Upaya dan Minimnya Kebijakan Afirmatif: Tantangan Kelembagaan dalam Pelestarian Bahasa

Di tengah kekhawatiran akan punahnya bahasa Wemale sebagai salah satu bahasa lokal di Maluku, fragmentasi kelembagaan tampak menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat upaya pelestarian secara berkelanjutan. Ketiadaan forum komunikasi antara sekolah, keluarga, PKBM, dan pemerintah desa membuat inisiatif-inisiatif yang ada berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang jelas dan tanpa visi bersama. Sub-sub sistem pendidikan dan sosial ini seolah bekerja dalam ruang-ruang terpisah, tanpa interkoneksi yang mendukung transformasi bahasa Wemale menjadi bagian dari identitas kolektif dan pembangunan lokal.

Observasi lapangan di Desa Uraur memperlihatkan bahwa meskipun terdapat inisiatif dari sekolah dan PKBM seperti Walang Belajar, tidak ada jembatan kebijakan yang mengikat dan mengoordinasikan kerja kolaboratif antaraktor tersebut. Misalnya, guru-guru di SMP Kristen 1 Kairatu masih sering menggunakan bahasa Wemale dalam aktivitas pengajaran, namun hal ini tidak terstruktur dalam kurikulum atau kebijakan sekolah. Salah seorang guru, yang disingkat A.O., menyatakan bahwa kebiasaan ini murni lahir dari latar budaya pribadi guru, bukan instruksi atau arahan dari lembaga pendidikan. Sementara itu, para siswa tetap menggunakan bahasa Indonesia selama proses belajar-mengajar karena lebih mudah dipahami. Bahkan sebagian dari mereka tidak lagi memahami bahasa Wemale, karena dalam keluarga mereka bahasa tersebut sudah tidak digunakan.

Fakta ini menunjukkan bahwa sekalipun terdapat upaya pelestarian dari aktor individu (seperti guru), tanpa dukungan regulatif dan kurikulum yang jelas, bahasa Wemale tidak akan mendapatkan legitimasi institusional yang memadai. Di sisi lain, informan W.O., seorang guru Bahasa Indonesia, mengungkapkan bahwa siswa sering kali merasa kebingungan saat guru menggunakan bahasa daerah dalam penjelasan materi. Meskipun mereka mengiyakan bahwa mereka paham, kenyataannya banyak yang tidak mengerti karena keterbatasan kosa kata dan familiaritas. Hal ini berdampak pada efektivitas pembelajaran dan menciptakan jurang antara bahasa pengantar dengan realitas pemahaman siswa.

Kelemahan lain yang cukup krusial adalah tidak adanya pengarusutamaan bahasa Wemale dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Dalam dokumen RPJMDes Desa Uraur, tidak ditemukan satupun rumusan kebijakan atau strategi yang secara eksplisit mencantumkan upaya pelestarian bahasa lokal. Padahal, sesuai dengan prinsip Cultural Sustainability, bahasa merupakan bagian penting dari identitas kultural yang seharusnya menjadi pilar dalam pembangunan berkelanjutan. Prasad & Lory (2020) menyebut fenomena ini sebagai *policy neglect in cultural sustainability*, yaitu ketika bahasa dan budaya lokal diabaikan dalam agenda kebijakan, sehingga peran mereka dalam mendukung ketahanan sosial-budaya menjadi terpinggirkan.

Wawancara dengan kepala desa berinisial J.L. mengonfirmasi hal ini. Ia menyebut bahwa belum ada langkah konkret dari pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan afirmatif terkait bahasa Wemale. “Masih sebatas kegiatan musiman,” ujarnya. Bahkan, dukungan anggaran untuk program seperti Walang Belajar juga masih minim dan bersifat insidental. Kegiatan tersebut lebih merupakan inisiatif personal atau komunitas daripada agenda resmi desa. Yilmaz (2021) menyebutkan bahwa situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya institusionalisasi bahasa minoritas jika tidak diikat oleh kebijakan yang kuat dan terencana. Bahasa tidak hanya membutuhkan ruang hidup dalam praktik sehari-hari, tetapi juga pengakuan dalam struktur formal. Tanpa pengarusutamaan bahasa Wemale dalam dokumen desa atau forum desa, tidak ada legitimasi yang bisa mengikat seluruh aktor untuk bertindak secara kolaboratif. Bahasa pun akhirnya terjebak dalam ruang nostalgia tanpa peluang hidup yang nyata di masa depan.

Kondisi seperti ini diperparah oleh kurangnya wadah interaksi lintas lembaga. Tidak ada forum yang secara rutin mempertemukan guru, tokoh adat, kepala desa, pengelola PKBM, dan orang tua untuk mendiskusikan arah pelestarian bahasa. Padahal, dalam masyarakat multiaktor, keberhasilan pelestarian bahasa sangat bergantung pada relasi sosial yang saling menguatkan dan adanya legitimasi kolektif terhadap nilai bahasa (Kayumova & Tippins, 2021). Dalam konteks Wemale, ketidakadaan forum kolaboratif ini membuat masing-masing institusi bekerja dalam silo—terputus satu sama lain dan seringkali saling menyalahkan ketika inisiatif yang diambil tidak berjalan maksimal.

Fragmentasi kelembagaan ini tidak hanya menunda agenda revitalisasi bahasa Wemale, tetapi juga merusak kesinambungan pengetahuan antargenerasi. Jika tidak segera dibenahi, maka proyek pelestarian bahasa Wemale akan terus bergantung pada semangat voluntaristik individu, bukan pada sistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonsiliasi antaraktor dan kebijakan afirmatif yang mengintegrasikan bahasa sebagai bagian dari visi pembangunan desa, bukan sekadar ekspresi budaya yang disimpan dalam nostalgia komunitas.

Bahasa sebagai Jalan Pulang: Rekonstruksi Identitas dalam Arus Perubahan Sosial

Dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan serba digital, pelestarian bahasa lokal seperti Wemale di Desa Uraur bukanlah semata-mata persoalan linguistik. Bahasa, dalam hal ini, memiliki dimensi yang jauh lebih dalam dan eksistensial. Ia menjadi jalan pulang—sebuah

cara untuk kembali memahami siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang sedang perlahan hilang dari kesadaran kolektif. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Yazan (2019), yang menekankan bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen refleksi diri, kritik sosial, dan medium untuk menegosiasikan identitas kultural dalam pusaran perubahan zaman.

Selama observasi lapangan yang dilakukan pada program Walang Belajar di PKBM Desa Uraur, terlihat bagaimana proses pembelajaran yang sederhana—duduk bersila di beranda rumah Bapak E.S. setiap Sabtu sore, mengucap dan mengulang kosakata Wemale—bukan sekadar kegiatan edukatif. Lebih dari itu, ia menjadi sebuah bentuk ritual kultural yang mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Anak-anak dan orang tua duduk bersama, mengucapkan kata demi kata, membangun kembali ingatan kolektif yang telah lama terfragmentasi. Suasana yang tercipta tidak kaku seperti kelas formal, melainkan hangat, akrab, dan sarat makna. Di sinilah PKBM memainkan perannya tidak hanya sebagai lembaga belajar, tetapi sebagai simbol resistensi atas dominasi bahasa dan budaya luar yang semakin mendominasi ruang hidup masyarakat.

Namun demikian, partisipasi generasi muda masih menjadi tantangan besar. Seperti disampaikan oleh Ibu W.O., yang juga seorang pengajar, banyak anak muda yang merasa canggung dan tidak percaya diri menggunakan bahasa Wemale, terutama di luar konteks pembelajaran. Dalam pandangan mereka, bahasa lokal terasa usang, tidak relevan, dan kurang prestisius di tengah budaya populer yang menawarkan bahasa Indonesia baku dan bahkan bahasa Inggris sebagai simbol modernitas. Pengalaman yang sama diungkapkan oleh Bapak J.L., Kepala Desa Uraur, yang mengakui bahwa meskipun kegiatan PKBM difokuskan untuk regenerasi bahasa, daya tariknya masih terbatas karena narasi kebudayaan belum berhasil dibingkai secara aspiratif bagi generasi baru.

Melalui lensa Critical Language Awareness, situasi ini mencerminkan ketidakseimbangan relasi kuasa dalam bahasa. Bahasa Wemale tidak hanya terpinggirkan secara sosial, tetapi juga mengalami delegitimasi simbolik—ia dianggap “tidak penting”, “tidak keren”, dan “tidak berguna secara ekonomi”. Maka, pelestariannya memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga ideologis: membongkar mitos bahwa bahasa lokal adalah beban, dan mulai menanamkan bahwa ia adalah aset identitas. Dalam salah satu pertemuan komunitas yang penulis hadiri, tampak bahwa ketika para orang tua diminta menceritakan asal-usul nama kampung dalam bahasa Wemale, anak-anak mulai menunjukkan ketertarikan. Di titik inilah bahasa tidak lagi berdiri sendiri, melainkan melekat pada cerita, memori, dan akar sejarah komunitas.

Pembelajaran bahasa Wemale melalui PKBM dan Walang Belajar bukan hanya transfer linguistik, tetapi juga proses rekonstruksi identitas kolektif. Ia menjadi sarana untuk mempertanyakan ulang nilai-nilai dominan yang dibawa modernitas, sekaligus menghidupkan kembali narasi lokal sebagai bagian dari ekosistem budaya yang berkelanjutan. Proses ini tidak selalu mudah dan instan. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Flores (2020), kesadaran bahasa yang kritis dapat menjadi titik awal untuk membangun

solidaritas kultural dan membentuk kembali kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan jati diri di tengah dunia yang terus berubah.

PKBM dalam konteks ini bukan hanya ruang belajar alternatif, tetapi juga ruang simbolik untuk memulihkan relasi antara bahasa, tanah, dan identitas. Ia menjadi rumah kedua tempat komunitas bisa kembali berbicara dalam bahasa yang berasal dari tanah sendiri—dengan cara yang sederhana, tetapi penuh makna. Bahasa Wemale, dalam hal ini, adalah jembatan antara generasi, antara masa lalu dan masa depan, antara identitas yang hampir hilang dan harapan untuk terus bertahan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian bahasa Wemale di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya mempertahankan warisan linguistik, melainkan sebagai proses kompleks yang berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan, stigma sosial, dan rekonstruksi identitas lokal. Ketimpangan peran antara keluarga, sekolah, dan pemerintah desa memperlihatkan bahwa aktor-aktor lokal belum memiliki koordinasi yang sinergis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini. Peran keluarga yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pewarisan bahasa justru mengalami pelemahan akibat tekanan modernisasi dan dominasi narasi bahasa nasional dan global, yang memproduksi stigma bahwa bahasa Wemale adalah simbol keterbelakangan. Namun, di tengah keterbatasan struktural dan ketiadaan kebijakan afirmatif dari pemerintah desa, PKBM hadir sebagai ruang alternatif yang strategis—tidak hanya untuk mengajarkan bahasa, tetapi juga untuk menegosiasikan kembali identitas kolektif masyarakat Wemale dalam konteks sosial yang berubah. Dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis komunitas melalui kegiatan seperti Walang Belajar, PKBM berhasil membingkai bahasa sebagai sarana pemulihan martabat budaya dan penguatan agensi komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian bahasa minoritas di Indonesia Timur membutuhkan lebih dari sekadar intervensi teknis; ia memerlukan rekayasa sosial yang mampu membongkar stigma, memperkuat legitimasi sosial bahasa lokal, dan membangun solidaritas kultural lintas generasi.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi

substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2021). Makassar Language Empowerment on the Use of Indonesian Language in Non-Formal Communication. *Proceedings of the 2nd International Conference of Linguistics and Culture (ICLC-2 2021)*, 92–96. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211225.014>
- Arju, S., & Zeffry, A. (2023). Main Factors Affected by the Threat of Extinction and Damage to the Betawi Language for Society. *LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature*, 3(4), 197–209. <https://doi.org/10.33258/linglit.v3i4.956>
- Beaudrie, S., Amezcua, A., & Loza, S. (2021). Critical language awareness in the heritage language classroom: design, implementation, and evaluation of a curricular intervention. *International Multilingual Research Journal*, 15(1), 61–81. <https://doi.org/10.1080/19313152.2020.1753931>
- Brata, I. B., Ida Bagus Rai, Lianda Dewi Sartika, & Ida Bagus Nyoman Wartha. (2022). Museum: Media of Non-Formal Education in Intruding Character Values Strengthening the National Self. *Mimbar Ilmu*, 27(3 SE-Articles), 435–442. <https://doi.org/10.23887/mi.v27i3.54321>
- Chun, C. W. (2019). Language, discourse, and class: What's next for sociolinguistics? *Journal of Sociolinguistics*, 23(4), 332–345. <https://doi.org/10.1111/josl.12359>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage Book.
- Flores, N. (2020). From academic language to language architecture: Challenging raciolinguistic ideologies in research and practice. *Theory Into Practice*, 59(1), 22–31. <https://doi.org/10.1080/00405841.2019.1665411>
- Grove, H. (2021). Ageing as well as you can in place: Applying a geographical lens to the capability approach. *Social Science & Medicine*, 288, 113525. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113525>
- Hadzantonis, M. (2019). Becoming Spiritual: Documenting Osing Rituals and Ritualistic Languages in Banyuwangi, Indonesia. In *GLOCAL Conference Proceedings*, 556–562. <https://doi.org/10.47298/cala2019.17-6>
- Imsiyah, N., Supriyono, Hardika, Wahyuni, S., & Alkornia, S. (2023). Transformative learning patterns based on non-formal education in marginal communities in Bondowoso District. *AIP Conference Proceedings*, 070009. <https://doi.org/10.1063/5.0111754>
- Kayumova, S., & Tippins, D. J. (2021). The quest for sustainable futures: designing transformative learning spaces with multilingual Black, Brown, and Latinx young people through critical response-ability. *Cultural Studies of Science Education*, 16(3), 821–839. <https://doi.org/10.1007/s11422-021-10030-2>
- Kinder, T., Six, F., Stenvall, J., & Memon, A. (2022). Governance-as-legitimacy: are ecosystems replacing networks? *Public Management Review*, 24(1), 8–33. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1786149>
- Klevens, J. (2023). *Computer-Assisted Interviews, Quality of Life BT - Encyclopedia of Quality*

- of Life and Well-Being Research* (F. Maggino (ed.); pp. 1287–1289). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1_3784
- Lim, M., Permana, L., Hongo, V. B., Kiandra, K., Nabasa, K., & Hasudungan, A. (2021). The Roles and Capabilities of Formal, Non-Formal, and Informal Institutions in Shaping Education Access in Cigugur Sub-district, West Java, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 696–708. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1653>
- Maggalatung, M., Ridwan, M., Syarifudin, S., Darma, D., & Sulaeman, S. (2021). Reviewing Sepa Language Extinction of the Indigenous Peoples of Amahai, Moluccas, Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 22, 778–789. <https://doi.org/10.47577/tssj.v22i1.4056>
- Meighan, P. J. (2021). Decolonizing the digital landscape: the role of technology in Indigenous language revitalization. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 17(3), 397–405. <https://doi.org/10.1177/11771801211037672>
- Mu'jizah, M., Handayani, R., Palupi, D., & Mujiningsih, E. N. (2022). Family-Based Language Learning: A Case Study of the Ponosakan Language Maintenance in North Sulawesi. *Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021, September 15, 2021, Semarang, Indonesia*, 88–93. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315608>
- Musi, M. A., Amal, A., Herlina, H., Asti, S. W., & Noviani, N. (2022). Internalization of local Values in Early Children's Education on the Bugis Local Wisdom. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6732–6745. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3318>
- Nurutdinova, N., Mustafina, J., Ibragimova, A., & Gataullina, C. (2020). The Role of Regional Media in the Promotion of Regional Languages in the Context of Linguistic Diversity. *14th International Technology, Education and Development Conference*, 2370–2377. <https://doi.org/10.21125/inted.2020.0721>
- Prasad, G., & Lory, M. (2020). Linguistic and Cultural Collaboration in Schools: Reconciling Majority and Minoritized Language Users. *TESOL Quarterly*, 54(4), 797–822. <https://doi.org/10.1002/tesq.560>
- Revis, M. (2019). A Bourdieusian perspective on child agency in family language policy. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 22(2), 177–191. <https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1239691>
- Román, D., Arias, J. M., Sedlacek, Q. C., & Pérez, G. (2022). Exploring Conceptions of Creativity and Latinidad in Environmental Education Through the Lens of Culturally Sustaining Pedagogy. *Review of Research in Education*, 46(1), 32–63. <https://doi.org/10.3102/0091732X221084332>
- Said, F., & Zhu, H. (2019). “No, no Maama! Say ‘Shaatir ya Ouledée Shaatir ’!” Children’s agency in language use and socialisation. *International Journal of Bilingualism*, 23(3), 771–785. <https://doi.org/10.1177/1367006916684919>
- Sarfo, J. O., Debrah, T., Gbordzoe, N. I., Afful, W. T., & Obeng, P. (2021). Qualitative Research Designs, Sample Size and Saturation: Is Enough Always Enough? *Journal of Advocacy, Research and Education*, 8(3), 60–65. <https://doi.org/10.13187/jare.2021.3.60>
- Shah, W. A. (2023). Privileged discourses, teacher agency and alternative subjectivities: Analyzing Janus-faced character of English language pedagogy. *Learning, Culture and Social Interaction*, 43, 100772.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100772>
- Siregar, I. (2022). Effective and Efficient Treatment of Regional Language Preservation Strategies in the Nusantara. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 4(2), 16–22. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.2.3>
- Spolsky, B. (2019). A modified and enriched theory of language policy (and management). *Language Policy*, 18(3), 323–338. <https://doi.org/10.1007/s10993-018-9489-z>
- Taher, M. D. S. (2022). Enggano Language Viability: Diglossia Leakage Phenomenon and Endangered Language Defense Strategy in Enggano. *Linguistik, Terjemahan, Sastra (LINGTERSA)*, 3(1), 50–65. <https://doi.org/10.32734/lingtersa.v3i1.8847>
- Taher, M. D. S., Oktaviani, V. D., Dewanda, K., Yosafat, V., & Firmonasari, A. (2022). Language Preservation Parameter: Assesment of Bengkulu Malay Language Vitality Using Level Endangerment Index. *Tradition and Modernity of Humanity*, 2(2), 33–48. <https://doi.org/10.32734/tmh.v2i2.10133>
- Tahir, S. Z. Bin, Hanapi, H., & Suriaman, A. (2020). Avoiding Maluku Local Languages Death Through Embedded Multilingual Learning Model. *Uniqbu Journal of Social Sciences*, 1(1), 53–60. <https://doi.org/10.35542/osf.io/qr924>
- Wang, C. (2019). Building a Network for Preserving Intangible Cultural Heritage through Education: A Study of Indonesian Batik. *International Journal of Art & Design Education*, 38(2), 398–415. <https://doi.org/10.1111/jade.12200>
- Woolard, K. A. (2020). Language Ideology. In *The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology* (pp. 1–21). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118786093.iela0217>
- Yamin, M., Setiawan, S., Anam, S., & Kurnia, F. D. (2020). Critical Thinking in Language Planning for Local Languages Maintenance: Evidence from Banjarese, Indonesia TT - Critical Thinking in Language Planning for Local Languages Maintenance: Evidence from Banjarese, Indonesia. *Mdrsjrns*, 11(5), 179–199. <https://doi.org/10.29252/LRR.11.5.179>
- Yazan, B. (2019). Toward identity-oriented teacher education: Critical autoethnographic narrative. *TESOL Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.1002/tesj.388>
- Yilmaz, T. (2021). Translanguaging as a pedagogy for equity of language minoritized students. *International Journal of Multilingualism*, 18(3), 435–454. <https://doi.org/10.1080/14790718.2019.1640705>
- Zulkarnain, Widiyanto, E., & Raharjo, K. M. (2021). Informal Education Process Teaches Preservation of Pantun Tradition to the Young Generation in Malay Society. *Proceedings of the 7th International Conference on Education and Technology (ICET 2021)*, 260–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.211126.072>